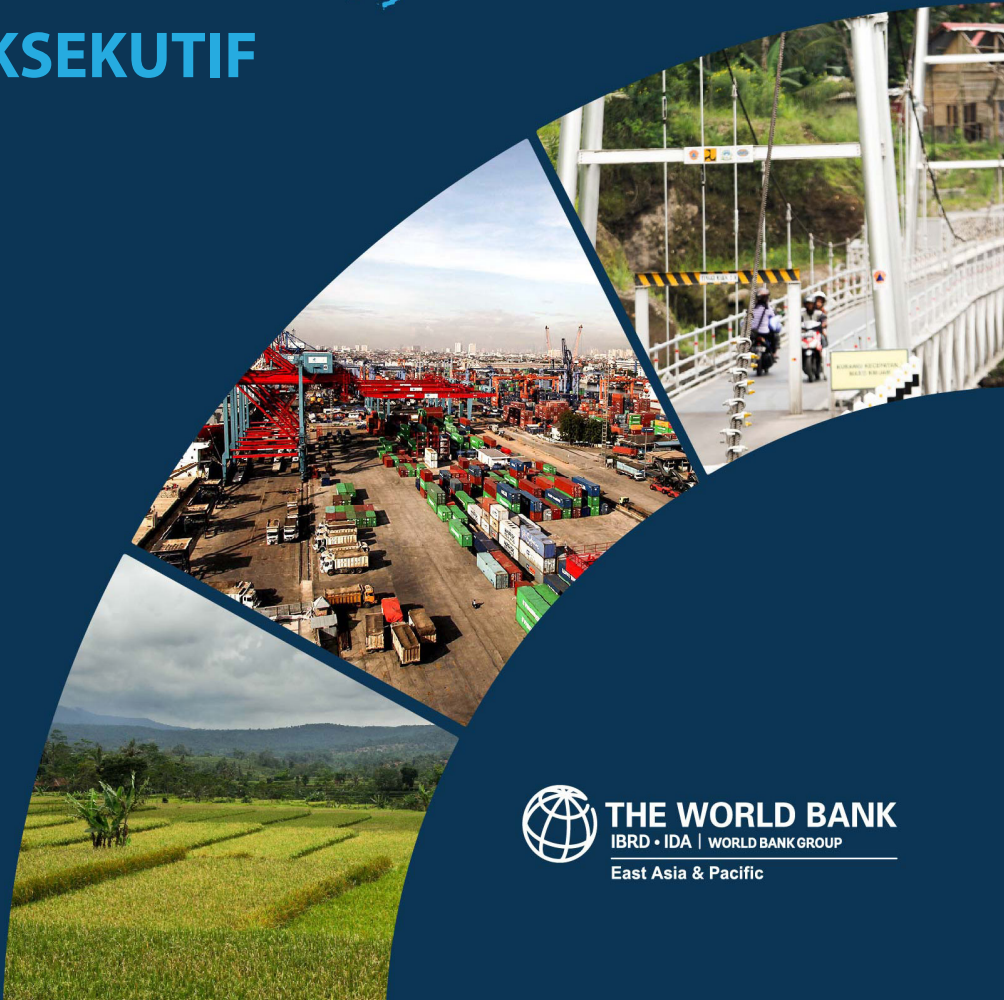


Pathways Towards Economic Security

INDONESIA POVERTY ASSESSMENT

RINGKASAN EKSEKUTIF



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP
East Asia & Pacific



Pathways Towards Economic Security

INDONESIA POVERTY ASSESSMENT

RINGKASAN EKSEKUTIF



THE WORLD BANK

IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

East Asia & Pacific

© 2023 The World Bank

1818 H Street NW, Washington DC 20433
Telephone: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org

Some rights reserved

This work is a product of the staff of The World Bank. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judgment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.

Rights and Permissions

The material in this work is subject to copyright. Because The World Bank encourages dissemination of its knowledge, this work may be reproduced, in whole or in part, for noncommercial purposes as long as full attribution to this work is given.

Attribution—Please cite the work as follows: “World Bank. 2023. Indonesia Poverty Assessment – Pathways Towards Economic Security. © World Bank.”

All queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.

PENDAHULUAN



Indonesia boleh dibilang telah mencapai tujuannya untuk memberantas kemiskinan ekstrim ketika kemiskinan tersebut mencapai 1,5 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan digabung dengan perlindungan sosial telah memungkinkan kemajuan ini. Indonesia sekarang dapat menetapkan sasaran yang lebih tinggi untuk meningkatkan kehidupan sepertiga penduduk Indonesia yang secara ekonomi masih tidak aman.

Karena Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, analisis kami dalam laporan ini mengungkap beberapa peluang serta hambatan penting untuk kemajuan lebih lanjut. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, hampir semua sektor, di pedesaan, daerah pertanian dan di perkotaan, memiliki produktivitas yang rendah, sementara pembangunan sumber daya manusia tertinggal dari negara-negara yang setara dan setengah dari perempuan Indonesia tetap tersisih dari angkatan kerja.

Masyarakat Indonesia membutuhkan kesempatan kerja yang lebih baik yang menawarkan penghasilan lebih tinggi di sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi. Meskipun sektor digital berkembang pesat, hanya satu dari sepuluh pekerja Indonesia yang memiliki pekerjaan dengan keterampilan tinggi, dan tidak cukup banyak pekerja yang memiliki keterampilan yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini di saat peluang tersebut muncul.

Ini adalah wilayah di mana kebijakan dapat membuat perbedaan. Analisis kami menawarkan beberapa perspektif yang mengarah pada beberapa rekomendasi. Serangkaian rekomendasi berfokus pada menciptakan peluang yang lebih baik. Integrasi ke dalam rantai nilai global dapat meningkatkan produktivitas Indonesia dan membantu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digitalnya. Daerah perkotaan membutuhkan investasi agar daerah-daerah tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan produktivitas yang telah kita lihat di negara-negara lain, sementara meningkatkan produktivitas pertanian dapat memberikan penghidupan yang lebih baik bagi para petani. Fasilitas penitipan anak yang lebih terjangkau dan berkualitas dapat membantu membuka peluang bagi perempuan.

Serangkaian rekomendasi lainnya berfokus pada melindungi masyarakat dari keterpurukan dalam kemiskinan. Indonesia rentan terhadap guncangan ekonomi, terutama dari kejadian-kejadian terkait cuaca. Antara tahun 1990 dan 2021, Indonesia mengalami lebih dari 300 bencana alam yang menimpa lebih dari 11 juta orang, dengan bencana terkait iklim mencapai sekitar 70 persen dari total bencana pada periode ini. Seperti biasa, masyarakat miskin dan tidak aman secara ekonomi memikul beban yang tidak proporsional ketika terjadi bencana.

Seperti banyak negara lainnya, Indonesia perlu meningkatkan perlindungan sosial, termasuk bantuan dan jaminan sosial, serta meningkatkan inklusi keuangan. Penting juga untuk meningkatkan ketangguhan infrastruktur terhadap guncangan. Langkah-langkah tersebut membutuhkan sumber daya, tetapi para pembuat kebijakan Indonesia memiliki pilihan untuk meningkatkan pembiayaan bagi “investasi yang berpihak pada masyarakat miskin” tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh analisis kami mengenai kebijakan perpajakan dan subsidi, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak sambil mengurangi pengeluaran untuk subsidi energi dan pertanian yang kurang efektif dan seringkali bersifat regresif. Dalam konteks ini, peningkatan efisiensi dan kualitas administrasi dan belanja pemerintah daerah, terutama untuk pendidikan dan kesehatan, juga menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Harapan kami adalah Kajian Kemiskinan ini akan membantu memberi informasi dan memperluas dialog publik tentang peluang dan tantangan serta kemungkinan solusi untuk menciptakan peluang yang lebih baik dan melindungi dari kemiskinan.

Satu Kahkonen

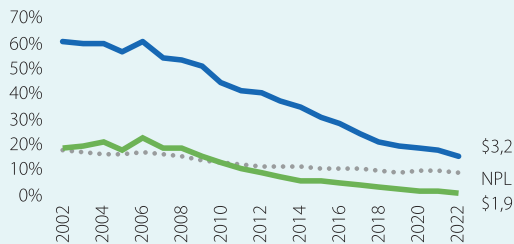
Country Director

World Bank Indonesia

Kemiskinan di Indonesia



Angka kemiskinan menggunakan \$1,90, \$3,20 per hari PPP (purchasing power parities atau paritas daya beli) tahun 2011 serta garis kemiskinan nasional (national poverty line, NPL)

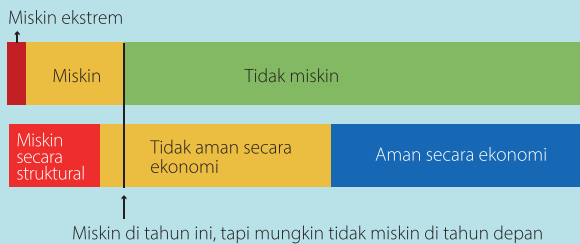


Pencapaian pengurangan kemiskinan pada dasarnya telah menghilangkan kemiskinan ekstrem (diukur dari US\$ 1,90 PPP 2011), sementara 16 persen penduduk tetap miskin pada tahun 2022

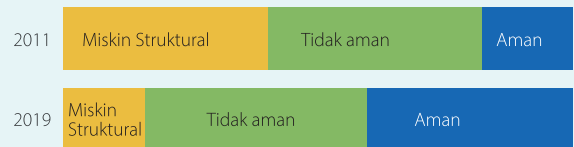
16%
penduduk tetap miskin



Namun demikian, lebih banyak masyarakat yang rentan untuk jatuh miskin karena guncangan



Pangsa penduduk yang diklasifikasikan sebagai miskin secara struktural, tidak aman secara ekonomi, dan aman secara ekonomi



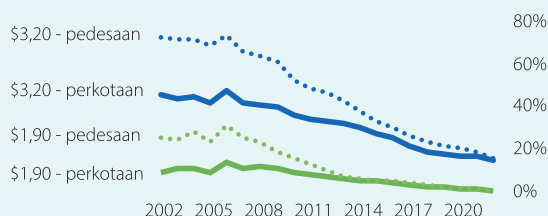
Tingkat kemiskinan perkotaan dan pedesaan telah mencapai tingkat yang sama



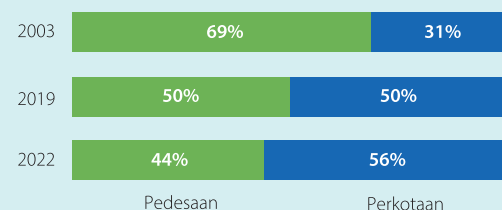
Artinya, sebagian besar penduduk miskin kini berada di perkotaan



Tingkat kemiskinan, menurut perkotaan/pedesaan



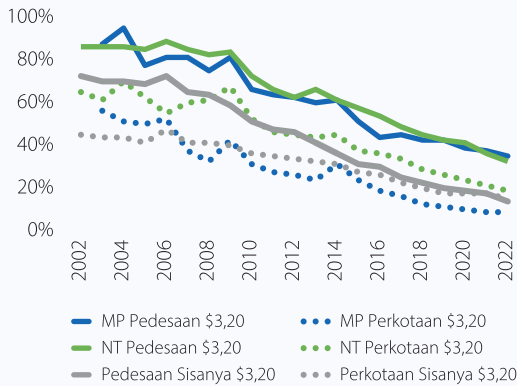
Pangsa penduduk miskin dan jumlah penduduk di daerah pedesaan dan perkotaan



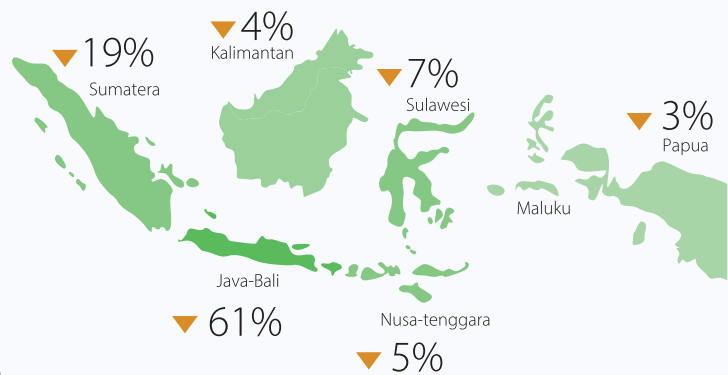
Meskipun secara umum mengejar ketertinggalan, pedesaan di Maluku Papua dan pedesaan di Nusa Tenggara masih memiliki angka kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia

Namun demikian, sebagian besar penduduk miskin tinggal di Jawa-Bali, Sumatera dan Sulawesi – karena Maluku Papua dan Nusa Tenggara berpenduduk lebih sedikit

Angka kemiskinan untuk Nusa Tenggara (NT), Maluku Papua (MP) dan wilayah lainnya



Pangsa penduduk miskin ekstrem, menurut wilayah



Rumah tangga yang lebih miskin



Sangat miskin Miskin Tidak aman secara ekonomi Aman secara ekonomi

Kategori	Sangat miskin	Miskin	Tidak aman secara ekonomi	Aman secara ekonomi
<p>Lebih besar dan harus mengurus lebih banyak anggota rumah tangga yang tergantung, kebanyakan anak-anak</p> <p>Ukuran</p>	6,0	5,3	4,1	3,2
<p>Lebih lazim bekerja di bidang pertanian daripada di bidang jasa dan lebih lazim berusaha sendiri atau pekerja lepas</p> <p>Anak-anak</p>	0,38	0,34	0,24	0,19
<p>Memiliki akses yang lebih sedikit terhadap listrik dan sanitasi yang layak, lebih jarang menggunakan gas untuk memasak, dan lebih sedikit akses internet</p> <p>Pendidikan</p>	5,9	6,6	6,4	10,1
<p>Pekerja lepas</p>	14%	15%	14%	5%
<p>Listrik</p>	92%	97%	98%	100%
<p>Gas</p>	51%	66%	74%	89%
<p>Internet</p>	10%	16%	25%	55%



“

Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam mengurangi kemiskinan, dengan daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal berhasil mengejar ketertinggalannya dan tujuan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 secara praktis telah terpenuhi

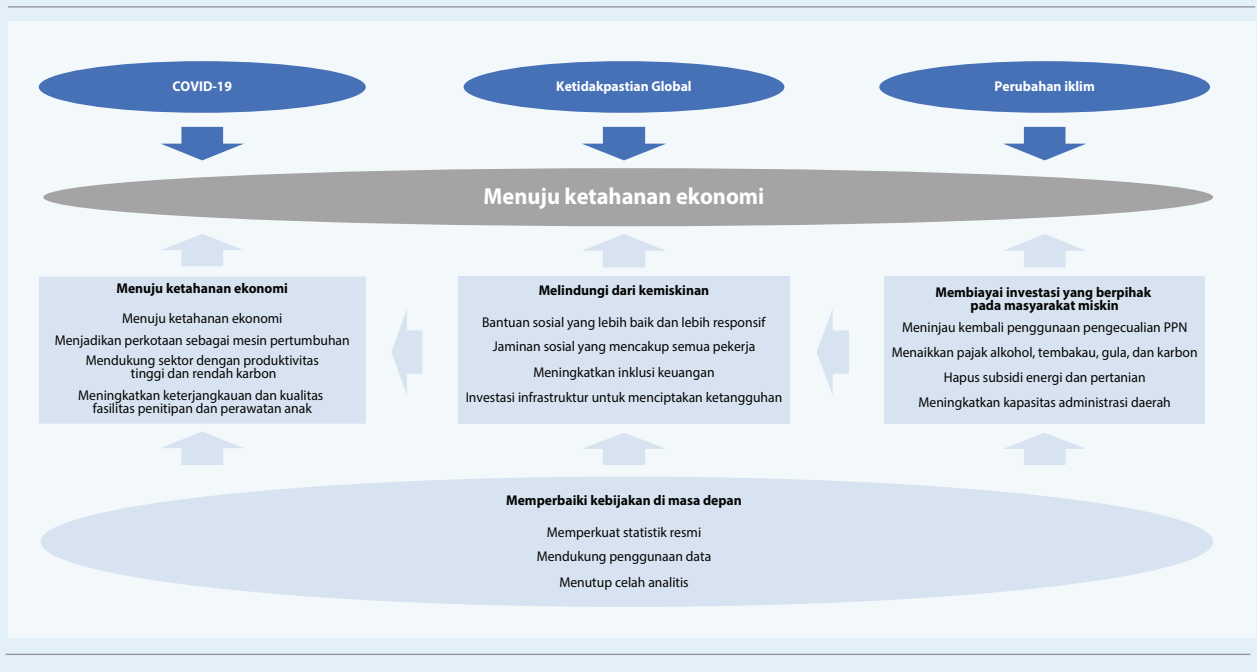
RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar

Indonesia memiliki rekam jejak pengentasan kemiskinan yang mengesankan, dan dapat membangun diatas keberhasilan tersebut untuk mengatasi target pengentasan kemiskinan yang lebih ambisius. Indonesia telah mencapai hasil yang mengesankan dalam mengurangi kemiskinan, dengan daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal berhasil mengejar ketertinggalannya dan tujuan Pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 secara praktis telah terpenuhi. Namun demikian, sebagai calon negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia mungkin ingin memperluas fokusnya di luar kemiskinan ekstrem dengan beralih dari garis kemiskinan US\$ 1,90 2011 PPP (paritas daya beli) ke garis yang lebih tinggi untuk negara berpenghasilan menengah. Fokusnya juga harus mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman, yang rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Apakah Indonesia siap menghadapi tantangan ini? Hasil sumber daya manusia masih belum memuaskan dan masih ada perbedaan geografis yang mengkhawatirkan. Produktivitas yang rendah masih menghalangi rumah tangga untuk menjadi aman secara ekonomi. Guncangan, termasuk dari perubahan iklim, terus mengancam upaya pengentasan kemiskinan. Kami mengidentifikasi beberapa jalur utama untuk mengatasi tantangan ini secara komprehensif dan berkelanjutan (Gambar ES1).

- (i) Menciptakan peluang yang lebih baik dalam produktivitas yang lebih tinggi dan pekerjaan rendah karbon untuk membantu rumah tangga menjadi aman secara ekonomi.
- (ii) Meningkatkan perlindungan sosial dan inklusi keuangan untuk memitigasi kerugian akibat adanya guncangan di masa mendatang.
- (iii) Mengembangkan sistem fiskal yang lebih efektif untuk investasi yang lebih berpihak pada masyarakat miskin yang berkontribusi pada sumber daya manusia melalui pemberian layanan publik yang lebih baik.
- (iv) Menutup kesenjangan data dan pengetahuan untuk memperbaiki kebijakan di masa mendatang untuk mendukung agenda ini.

GAMBAR ES1: Empat jalur dengan prioritas kebijakan (hijau) menuju ketangguhan ekonomi dapat mengatasi tantangan utama (oranye) yang dihadapi Indonesia

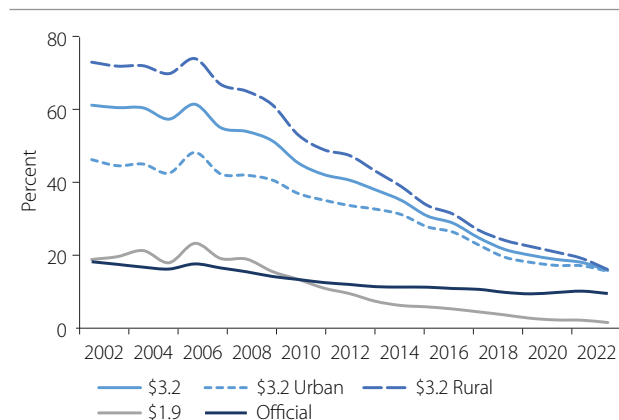


Kemajuan dan tantangan

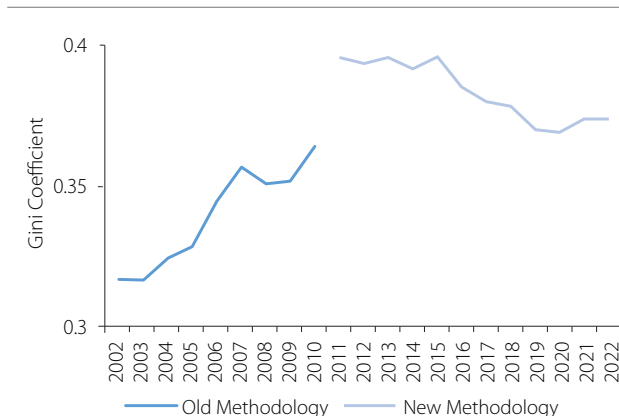
Tren

Setelah memberantas hampir semua kemiskinan ekstrim, Indonesia kini dapat beralih untuk memperluas definisi kemiskinannya sesuai dengan status pendapatan menengahnya. Kemiskinan ekstrim yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari US\$ 1,90 2011 PPP (paritas daya beli) per hari, turun dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022 (Gambar ES2), secara praktis memenuhi tujuan Pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim lebih cepat dari jadwal yang diharapkan pada tahun 2024. Sejumlah kecil kemiskinan friksional yang ekstrim kemungkinan besar akan tetap ada untuk beberapa waktu. Dengan kemiskinan ekstrim yang hampir hilang, strategi pengentasan kemiskinan harus memperluas fokusnya agar mencakup juga rumah tangga miskin – tetapi tidak sangat miskin. Negara berpenghasilan menengah ke bawah menggunakan garis kemiskinan yang lebih tinggi yang ditetapkan sebesar US\$ 3,20 PPP (paritas daya beli) 2011 per hari.

GAMBAR ES2: Kemiskinan turun drastis dari tahun 2002 hingga 2022 jika diukur dengan garis kemiskinan internasional absolut



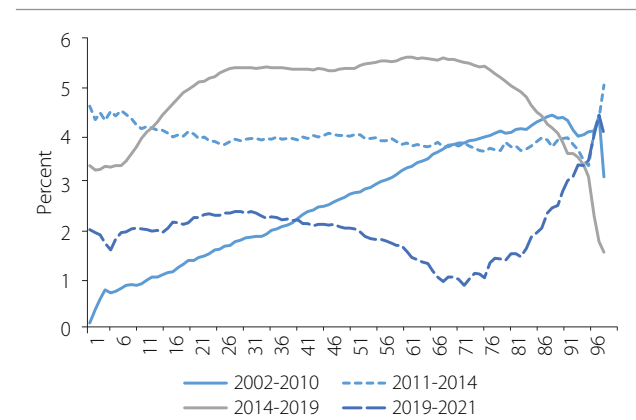
GAMBAR ES4: Ketimpangan meningkat secara substansial dari tahun 2002 hingga 2010 sebelum stagnan dan menurun dari tahun 2014 hingga 2019 dan sedikit meningkat akibat COVID-19 pada tahun 2021



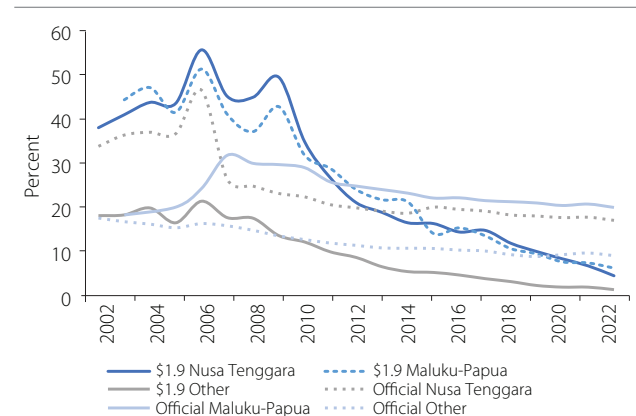
Bahkan dengan definisi kemiskinan yang lebih luas, Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengentasan kemiskinan, sementara ketimpangan perlahan menurun. Kemiskinan, yang diukur pada lini negara berpenghasilan menengah ke bawah sebesar US\$ 3,20 2011 PPP (paritas daya beli) per hari juga menurun tajam dari 61 persen pada tahun 2002 menjadi 16 persen pada tahun 2022. Peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong pengentasan kemiskinan dalam dekade terakhir, berkontribusi terhadap pertumbuhan lapangan kerja di pasar tenaga kerja yang ketat dan peningkatan upah riil. Sifat pertumbuhan yang inklusif ini (Gambar ES3) membalikkan tren peningkatan ketimpangan sebelumnya di saat pertumbuhan ekonomi sebagian besar menguntungkan rumah tangga yang lebih kaya (Gambar ES4).

Pengentasan kemiskinan berbasis luas, yang memungkinkan sebagian besar daerah tertinggal untuk mengejar ketinggalan, kecuali daerah pedesaan

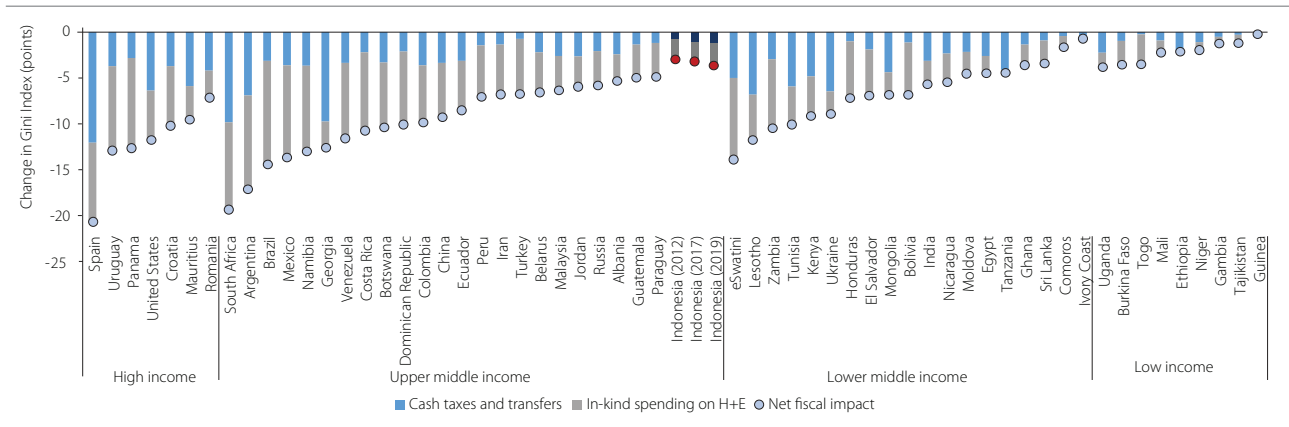
GAMBAR ES3: Pertumbuhan konsumsi tahunan (berdasarkan persentil konsumsi) menjadi lebih berpihak pada masyarakat miskin sejak 2011 dan seterusnya



GAMBAR ES5: Tingkat kemiskinan di seluruh wilayah mengalami konvergensi, saat menggunakan estimasi kemiskinan absolut



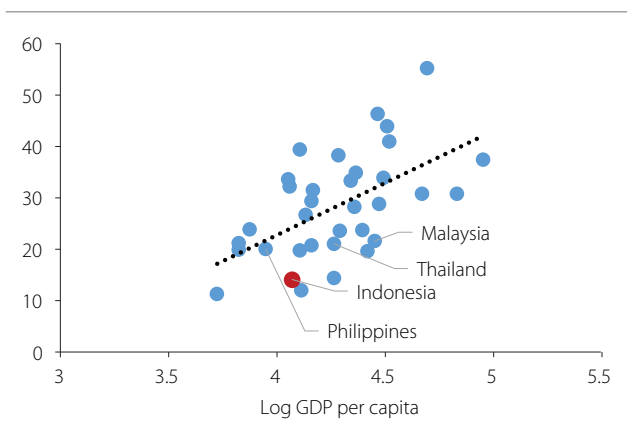
GAMBAR ES6: Kebijakan fiskal Indonesia hanya berdampak terbatas pada ketimpangan, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah



di dua provinsi. Kemiskinan menurun dari 46 persen di daerah perkotaan dan 73 persen di daerah pedesaan pada tahun 2002 menjadi 16 persen baik di daerah perkotaan maupun pedesaan pada tahun 2022. Saat ini, lebih dari separuh penduduk miskin (56 persen) tinggal di daerah perkotaan. Konvergensi serupa tetapi lebih lambat terjadi antar daerah. Dua daerah tertinggal utama, Nusa Tenggara (NT) dan Maluku-Papua (MP), mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 50 poin persentase dari sekitar 80 persen pada tahun 2002 menjadi di bawah 30 persen pada tahun 2022, dibandingkan dengan penurunan sekitar 40 poin persentase di wilayah yang tersisa (Gambar ES5). Namun demikian, daerah pedesaan di Nusa Tenggara dan Maluku masih tetap tertinggal.

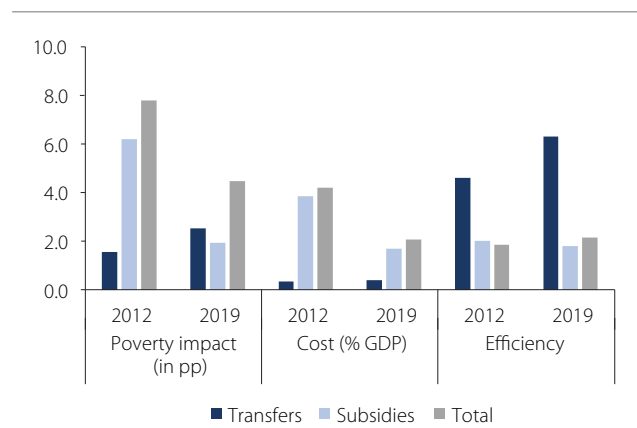
Kebijakan fiskal berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi penerimaan pemerintah yang rendah dan subsidi yang berbiaya tinggi mengurangi ruang fiskal dan membatasi lebih

GAMBAR ES7: Pendapatan pemerintah Indonesia relatif terhadap PDB per kapita tetap rendah, sehingga membatasi ruang untuk investasi



banyak investasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Ketimpangan menurun sekitar 3 poin koefisien Gini melalui kebijakan fiskal (Grafik ES6). Capaian ini dibawah capaian sebagian besar negara berpenghasilan menengah dan tinggi yang berkisar antara 5 hingga 15 Gini poin karena beberapa alasan. Pertama, pendapatan fiskal relatif terhadap PDB termasuk rendah dibandingkan dengan negara-negara setara (Gambar ES7). Kedua, subsidi pertanian tinggi dan mendistorsi pasar, tanpa manfaat nyata bagi kaum miskin. Ketiga, subsidi energi yang mahal muncul kembali setelah adanya pengurangan sementara, tetapi dengan manfaat yang terbatas untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Keempat, bantuan sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan (Gambar ES8) tetapi masih belum cukup untuk memberikan cakupan dan manfaat yang dibutuhkan meskipun telah ditingkatkan. Tantangan dalam memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan data rujukan untuk penetapan target, dapat meningkatkan

GAMBAR ES8: Dana transfer jauh lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan daripada subsidi energi



kesalahan inklusi dan eksklusif. Kelima, ruang fiskal yang ketat menyebabkan kurangnya investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, dan – diperparah oleh rendahnya kapasitas administrasi pemerintah daerah – menghambat peningkatan hasil sumber daya manusia dan kesenjangan geografis.

Tantangan produktivitas yang rendah

Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia rentan jatuh miskin jika terkena guncangan Pada tahun 2019, 40 persen penduduk Indonesia tidak aman secara ekonomi. Sebagian besar rumah tangga ini tidak miskin tetapi dapat jatuh miskin jika terkena guncangan. Rumah tangga yang tidak aman secara ekonomi dapat dipaksa untuk mengadopsi strategi yang merugikan mereka untuk mengatasi guncangan seperti mengurangi aset fisik dan sumber daya manusia mereka, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas jangka pendek dan jangka panjang. Mereka juga dapat mengantisipasi guncangan dan mengadopsi strategi produksi dan investasi yang konservatif atau menghindari risiko, mengurangi produktivitas mereka bahkan tanpa adanya guncangan. Jadi, terlepas dari apakah diadopsi setelah atau sebelum guncangan, strategi penanggulangan yang merugikan mengurangi produktivitas jangka panjang, yang pada gilirannya menurunkan peluang untuk keluar dari kemiskinan dengan aman.

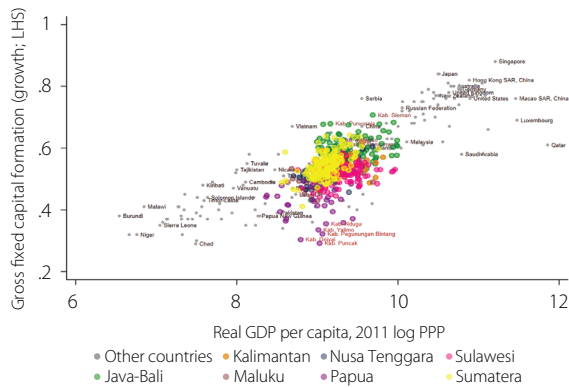
Sektor pertanian dan jasa dengan nilai tambah rendah (NT rendah) tetap menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan, meskipun pekerjaan tersebut seringkali tidak terlalu produktif atau tidak cukup untuk mendukung upaya keluar dari kemiskinan. Pendapatan pertanian mendorong pengentasan kemiskinan di pedesaan. Namun demikian, banyak petani tetap miskin karena mereka terkendala pada produktivitas rendah dalam strategi pemenuhan kebutuhan hidup dan produksi beras. Serangkaian insentif yang menyimpang bagi produsen pertanian dan harga bahan pokok yang tinggi karena pembatasan impor berkontribusi pada lambatnya diversifikasi ke tanaman komersial bernilai lebih tinggi, di mana tanah di beberapa daerah mungkin lebih cocok. Sektor jasa dengan NT rendah memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah perkotaan, dengan jumlah pekerja yang meningkat

di sektor ini. Namun demikian, pekerjaan ini seringkali bersifat informal dan produktivitasnya rendah, dengan banyak pekerja yang tetap miskin.

Pekerjaan berketerampilan tinggi tetap langka di Indonesia, membatasi jalan menuju keamanan ekonomi. Beberapa peluang yang lebih produktif sebenarnya tersedia – seperti di bidang manufaktur dan jasa dengan NT tinggi. Namun demikian, tidak cukup banyak pekerja yang memiliki keterampilan yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini. Pada saat yang sama, jumlah pekerjaan berketerampilan tinggi tersebut – yang sering didapati di bidang manufaktur – tetap jauh di bawah tingkat yang diharapkan jika dibandingkan dengan status pembangunan Indonesia. Faktanya, deindustrialisasi prematur mengurangi pangsa keluaran manufaktur dari 48 persen pada tahun 2002 menjadi 41 persen pada tahun 2019 sementara sektor jasa bertumbuh dari 36 menjadi 46 persen. Meskipun pembangunan berbasis jasa dimungkinkan, ekonomi yang semakin berorientasi ke dalam kehilangan potensi peningkatan produktivitas dari integrasi rantai nilai global dan persaingan ekspor. Produktivitas sektor jasa turun dari rata-rata 4,0 persen dari tahun 2000 hingga 2013 menjadi 1,7 persen dari tahun 2014 hingga 2019 karena pertumbuhan pekerjaan jasa dengan NT rendah melampaui pekerjaan jasa dengan NT tinggi (Gambar ES10). Tidak adanya transformasi struktural yang meningkatkan produktivitas melemahkan potensi Indonesia, tidak hanya dalam menurunkan kemiskinan dan kerawanan ekonomi secara berkelanjutan, tetapi juga dalam pertumbuhan ekonomi.

Migrasi perkotaan yang rendah membatasi peningkatan produktivitas karena lebih sedikit pekerja yang dapat memanfaatkan kekuatan aglomerasi positif. Peningkatan produktivitas di daerah perkotaan lebih banyak dipicu oleh kekuatan aglomerasi dibandingkan karena pekerja yang lebih produktif pindah ke daerah perkotaan. Tren urbanisasi resmi Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perubahan klasifikasi karena daerah pedesaan meningkatkan kepadatannya menjadi lebih ke perkotaan, daripada rumah tangga pedesaan pindah ke daerah perkotaan. Namun demikian, urbanisasi akan tetap menjadi kekuatan yang penting. Meskipun daerah perkotaan menawarkan

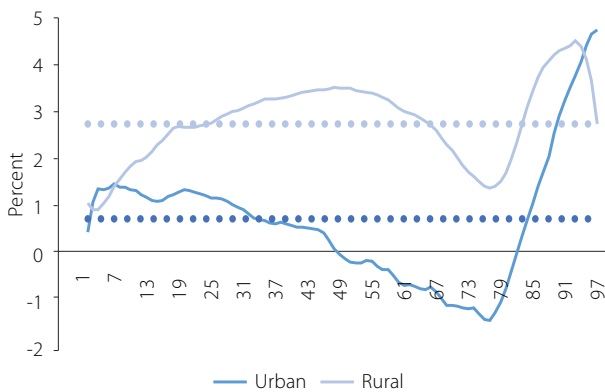
GAMBAR ES9: Indeks modal manusia Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain, dengan beberapa daerah tertinggal jauh



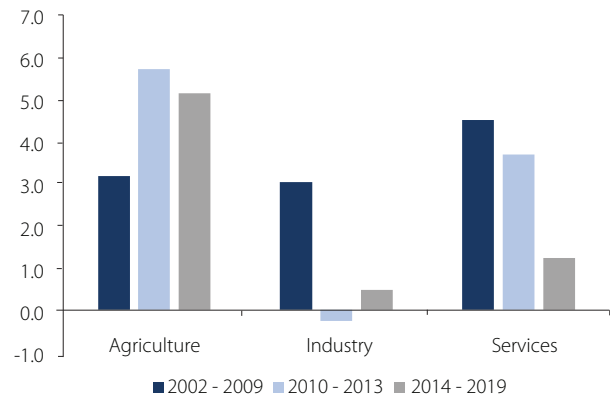
sebagian besar pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi, seperti di sektor manufaktur dan jasa dengan NT tinggi, jumlah peluang seperti itu tidak mencukupi. Selain itu, daerah perkotaan memiliki biaya hidup yang tinggi (karena biaya perumahan), kemacetan lalu lintas yang mengganggu keterhubungan perkotaan, dan pencemaran udara yang tinggi. Dengan demikian, daerah perkotaan tidak dapat menarik lebih banyak pekerja, sehingga membatasi keuntungan aglomerasi lebih lanjut. Hal ini juga membatasi efek limpahan mereka ke daerah pedesaan terdekat, memberikan peluang yang lebih kecil untuk diversifikasi dari pertanian.

Banyak perempuan belum menjadi bagian dari angkatan kerja, dibatasi oleh norma budaya dan tanggung jawab perawatan keluarga di rumah, sehingga membatasi peluang mata pencaharian untuk rumah tangga. Sementara lebih dari 80 persen

GAMBAR ES11: COVID-19 memengaruhi pertumbuhan konsumsi dari tahun 2020 hingga 2021 (ditunjukkan oleh persentil konsumsi) di perkotaan jauh lebih kuat dibandingkan dengan di pedesaan

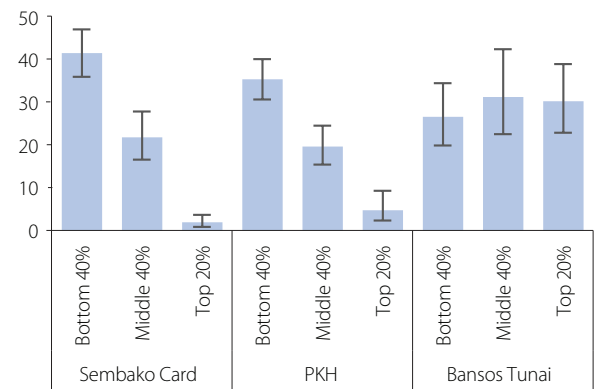


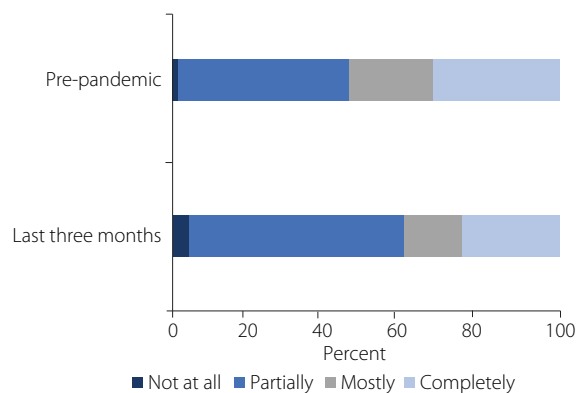
GAMBAR ES10: Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja menurun terutama di sektor industri dan jasa



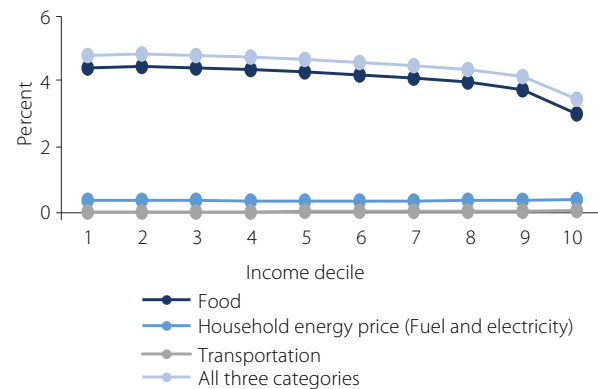
laki-laki (walaupun dengan tren yang secara perlahan menurun) berada dalam angkatan kerja, hanya sekitar 50 persen perempuan yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Norma budaya memainkan peran penting, yang diterjemahkan sebagai diskriminasi pasar tenaga kerja. Perempuan berpenghasilan lebih rendah dari pria, didorong oleh “efek perempuan” tertentu. Mereka juga memiliki tanggung jawab merawat anggota keluarga, membatasi peran serta mereka dalam angkatan kerja. Hal ini menjelaskan adanya kesenjangan kemiskinan gender yang kecil, terutama bagi perempuan di sekitar usia subur. Sementara merawat anggota rumah tangga adalah pekerjaan, seringkali merupakan kegiatan yang kurang memberikan hasil banyak dibandingkan dengan berperan serta dalam pasar tenaga kerja. Hal ini membatasi mata pencaharian rumah tangga, dan dapat membuat perbedaan antara menjadi miskin, tidak aman secara ekonomi, atau aman secara ekonomi.

GAMBAR ES12: Persentase penerima manfaat perlindungan sosial pada Maret 2021, yang menerima manfaat apa pun sejak awal pandemi



GAMBAR ES13: Pangsa penerima manfaat program yang menilai manfaat sudah memadai

Capaian sumber daya manusia di Indonesia perlahan-lahan membaik tetapi tetap di bawah negara-negara setara, terutama di provinsi Maluku-Papua dan Nusa Tenggara di Indonesia, melemahkan potensi produktif penduduk dan memperburuk ketimpangan. Akses ke pendidikan dasar hampir merata sejak tahun 2015, kecuali Nusa Tenggara dan Maluku-Papua, di mana angka partisipasi sekolah dasar stagnan di sekitar 80 persen. Di tingkat menengah, angka partisipasi antara penduduk miskin dan tidak miskin menyatu tetapi tetap pada tingkat yang relatif rendah, sekitar 80 persen. Kualitas pembelajaran tetap menjadi perhatian, seperti yang diharapkan 12,4 tahun sekolah menjadi hanya 7,8 tahun yang disesuaikan dengan pembelajaran. Angka kematian ibu di Indonesia, dan indikator kesehatan utama lainnya, berfluktuasi dan tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, indeks modal manusia Indonesia hanya sedikit meningkat, dari 0,5 pada tahun 2010 menjadi 0,54 pada tahun 2020; artinya, anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya 54 persen yang produktif jika mendapat pendidikan dan kesehatan penuh. Ini tidak hanya relatif rendah dibandingkan negara-negara setara lainnya (Gambar ES9), tetapi juga menunjukkan disparitas geografis yang kuat. Nusa Tenggara dan Maluku-Papua, memiliki hasil yang lebih buruk, sebanding dengan negara-negara dengan PDB per kapita yang jauh lebih rendah, menjadi penyebab berlanjutnya ketimpangan dalam jangka menengah dan panjang.

GAMBAR ES14: Kenaikan harga pada paruh pertama tahun 2022 menurunkan daya beli secara signifikan, tetapi lebih rendah untuk rumah tangga yang lebih kaya

Tantangan dari guncangan

Guncangan, seperti COVID-19, dapat mengancam kemajuan pengentasan kemiskinan. Pandemi COVID-19 mendorong perekonomian Indonesia ke dalam resesi sebelum pulih kembali pada tahun 2021. Hal ini memberikan contoh nyata tentang guncangan hebat yang berdampak pada pekerjaan dan kesehatan. Hal ini mengubah pengentasan kemiskinan secara signifikan, karena berdampak pada sebagian besar rumah tangga yang relatif lebih kaya, tetapi bukan yang terkaya, terutama di daerah perkotaan (Gambar ES11). Pemerintah dengan cepat meningkatkan bantuan sosial, menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan meningkatkan tingkat manfaatnya. Namun demikian, tidak semua rumah tangga yang membutuhkan menerima manfaat, juga tidak selalu menerima manfaat yang memadai Kurang dari 40 persen dari masyarakat 40 persen termiskin menerima manfaat dari perluasan program bantuan sosial (Gambar ES12). Kurang dari separuh penerima manfaat program menilai sendiri manfaat program saat ini sebagai memadai pada saat pandemi COVID-19 (Gambar ES13). Demikian pula, program jaminan sosial tidak berhasil melindungi semua pekerja. Secara khusus, pekerja informal seringkali tidak memiliki akses ke cuti sakit atau tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan pengangguran pemerintah.

Perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan guncangan alam, yang dapat menjebak rumah tangga miskin ke dalam kemiskinan dan mendorong rumah tangga yang tidak

aman secara ekonomi kembali ke dalam kemiskinan. Antara tahun 1990-2021, Indonesia mengalami lebih dari 300 bencana alam, termasuk 200 banjir, yang berdampak pada lebih dari 11 juta orang. Bencana terkait iklim telah mencapai sekitar 70 persen dari total jumlah bencana dari tahun 1990 hingga 2021. Meskipun perubahan iklim memengaruhi seluruh penduduk, masyarakat miskin dan tidak aman secara ekonomi kemungkinan besar akan menanggung beban yang tidak proporsional. Mereka lebih sering mengandalkan pertanian, yang terkena dampak negatif, dan mereka sering tinggal di daerah yang rawan risiko tanpa sumber daya untuk melindungi aset dan lebih sedikit tabungan untuk pulih kembali.

Mitigasi perubahan iklim secara khusus akan merugikan pekerja di sektor industri padat karbon jika tidak dilindungi. Seiring dengan pembangunan Indonesia selama beberapa dekade terakhir, emisi gas rumah kaca (GRK) meningkat tajam, menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar ketujuh di dunia. Indonesia adalah pengekspor batu bara terbesar di dunia, dengan ekspor batu bara mewakili 2 persen dari PDB, atau 13 persen dari total ekspor barang. Pada tahun 2021, Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK secara substansial dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060. Penghapusan batubara secara bertahap akan berdampak terutama pada masyarakat penghasil batubara, dengan jumlah pekerja tambang batubara sebesar 0,2 persen dari total pekerja formal pada tahun 2018. Namun demikian, jumlah yang lebih besar dari pekerja batubara dipekerjakan secara informal. Dengan pertambangan batu bara terkonsentrasi di wilayah dan komunitas tertentu, penghapusan batu bara secara bertahap akan secara langsung mengurangi lapangan kerja di pertambangan tetapi juga secara tidak langsung melalui perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pertambangan batu bara dan para pekerjanya.

Dikombinasikan dengan ketidakpastian global, seperti invasi Rusia ke Ukraina, risiko ini mengancam kemajuan pengentasan kemiskinan di Indonesia jika rumah tangga tidak terlindungi. Perang di Eropa telah memicu volatilitas harga yang tinggi, terutama untuk makanan dan bahan bakar. Daya beli rumah tangga di Indonesia memburuk (Grafik ES14), terutama karena kenaikan harga pangan dan porsi konsumsi

pangan yang besar. Pada saat yang sama, Pemerintah mempertahankan harga bahan bakar secara konstan dengan secara implisit meningkatkan subsidi bahan bakar, yang semakin menambah beban fiskal mengingat adanya kebutuhan anggaran yang lebih besar. Dengan akses yang tidak memadai ke perlindungan sosial dan layanan keuangan, rumah tangga miskin dan tidak aman secara ekonomi kurang mampu menghadapi guncangan dan mungkin harus menggunakan strategi penanggulangan yang merugikan.

Jalan menuju keamanan ekonomi

Di jalur menuju pendapatan tinggi, kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia perlu diperluas melalui pendekatan multi-cabang: menciptakan peluang yang lebih baik, melindungi rumah tangga dari kemiskinan, dan memfokuskan sumber daya fiskal pada investasi yang berpihak pada masyarakat miskin, sambil mendorong pemanfaatan informasi dan bukti yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Mengingat pembangunan dan ambisi Indonesia, definisi kemiskinan yang lebih luas, misalnya di sekitar garis kemiskinan US\$ 3,20 2011 PPP, akan lebih memadai. Diperlukan peluang yang lebih baik di daerah pedesaan, melalui produktivitas pertanian yang lebih tinggi, serta daerah perkotaan, dengan menjadikan kota sebagai mesin pertumbuhan. Pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi di sektor rendah karbon dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, sekaligus memanfaatkan peluang digital. Namun demikian, guncangan tidak dapat dihindari dan akan menjadi lebih sering dengan adanya perubahan iklim, tetapi ketangguhan dapat dipupuk untuk meminimalkan kerugiannya. Dengan sekitar setengah dari penduduk tidak miskin yang rentan untuk jatuh kembali ke dalam kemiskinan, diperlukan ketangguhan dan perlindungan yang lebih baik. Langkah-langkah ini akan membutuhkan investasi publik dalam ruang fiskal yang ketat. Kebijakan perlu memastikan desain hemat biaya sambil meningkatkan pendapatan dan menghilangkan kendala untuk meningkatkan sumber daya manusia secara merata di seluruh negeri. Yang terakhir, para pembuat kebijakan perlu menutup kesenjangan data dan pengetahuan yang masih ada untuk dapat memberi informasi bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

Menciptakan peluang yang lebih baik

Kebijakan dapat mendukung sektor swasta untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dengan produktivitas lebih tinggi, dalam konteks perubahan iklim, desain ulang rantai nilai global (*global value chains, GVC*) yang sedang berlangsung, dan digitalisasi. Untuk dapat terus mengurangi kemiskinan yang luas dan membantu rumah tangga mencapai keamanan ekonomi, diperlukan peluang yang lebih baik. Peningkatan produktivitas pertanian dapat memberikan mata pencaharian yang lebih baik bagi para petani dan memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan. Daerah perkotaan membutuhkan investasi untuk memungkinkan mereka menjadi mesin pertumbuhan produktivitas. Peluang yang lebih baik di sektor rendah karbon dengan pertumbuhan produktivitas tinggi dapat meningkatkan pendapatan. Integrasi ke dalam rantai nilai global memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitasnya melalui daya saing. Digitalisasi juga memberikan peluang, dan Indonesia dapat memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digitalnya. Yang terakhir, fasilitas penitipan anak yang lebih terjangkau dan berkualitas tinggi dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang bagi perempuan untuk bergabung dengan angkatan kerja.

Peningkatan produktivitas pertanian dapat meningkatkan pendapatan pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dengan menggunakan pendekatan cerdas iklim dapat memberikan penghidupan yang lebih baik bagi petani dan memungkinkan mereka untuk keluar dari kemiskinan, yang sangat relevan untuk rumah tangga di daerah terpencil. Bagi dua pertiga rumah tangga pertanian pedesaan yang miskin, pekerjaan mereka tidak mencukupi untuk dapat keluar dari kemiskinan mengingat produktivitas yang rendah. Meningkatkan layanan penyuluhan pertanian dan akses pasar dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Menghapus subsidi pertanian yang berfokus pada produksi pangan dapat mendorong pertanian tanaman komersial, seringkali lebih cocok untuk beberapa kondisi lahan. Subsidi saat ini mahal dan hanya menunjukkan sedikit manfaat. Menghilangkan hambatan impor pangan juga dapat membantu, karena hambatan tersebut membuat harga pangan tetap tinggi tanpa membantu petani miskin – karena sebagian besar adalah konsumen bersih pangan – dan mengalihkan sumber daya dari tanaman bernilai lebih tinggi.

Berinvestasi dalam infrastruktur perkotaan dapat membuka potensi kota untuk menjadi mesin pertumbuhan dan memperkuat dampak limpahan pedesaan. Kawasan perkotaan membutuhkan investasi untuk menjadi mesin pertumbuhan produktivitas. Memelihara transformasi struktural yang lebih bermakna dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi para pekerja di daerah perkotaan. Investasi dalam infrastruktur perkotaan dapat membantu menurunkan biaya hidup di perkotaan. Secara bersama-sama, hal tersebut membuat kota menjadi tempat yang lebih menarik untuk ditinggali. Lebih banyak pekerja yang pindah ke daerah perkotaan meningkatkan kekuatan aglomerasi, membantu meningkatkan produktivitas. Hal ini juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan terdekat, menciptakan peluang di luar sektor pertanian.

Diperlukan adanya peluang yang lebih baik di sektor rendah karbon dengan pertumbuhan produktivitas tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan daya saing, termasuk kebijakan perdagangan dan investasi asing langsung yang tidak terlalu ketat serta kebijakan anti persaingan yang lebih efektif, dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja, sementara kawasan industri ramah lingkungan dan solusi ekonomi sirkular dapat menurunkan jejak karbon dari sektor produktivitas tinggi. Integrasi ke dalam rantai nilai global (*global value chains, GVC*) menarik investasi asing langsung untuk ekspor dan dapat meningkatkan produktivitas, khususnya di sektor rendah karbon. Pemetaan kembali GVC secara global saat ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat integrasinya, tetapi hal ini memerlukan adanya perubahan kebijakan perdagangan yang semakin ketat dan membuka ekonomi untuk peluang eksternal. Demikian pula, digitalisasi dapat memberikan peluang tetapi membutuhkan keterampilan digital, konektivitas, dan lingkungan kebijakan yang mendukung. Pada saat yang sama, para pekerja perlu dibekali dengan bauran keterampilan yang tepat untuk mempersiapkan diri bagi jenis pekerjaan baru; misalnya, kebijakan harus meningkatkan tingkat dan kualitas pendidikan menengah dan khususnya pendidikan tinggi dan berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi teknis (*Technical and Vocational Trainings, TVET*).

Menawarkan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong peran serta angkatan kerja perempuan, dan meningkatkan produktivitas. Dengan fasilitas penitipan anak yang terjangkau, perempuan dapat beralih dari pekerjaan tidak berbayar ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi, meningkatkan keterampilan pasar tenaga kerja dan produktivitas perusahaan. Fasilitas penitipan anak membantu menutup kesenjangan upah gender, yang masih cukup besar di Indonesia. Fasilitas penitipan anak menciptakan lapangan kerja, dan memupuk pembelajaran anak usia dini, dengan manfaat jangka panjang untuk produktivitas ekonomi.

Menciptakan peluang yang lebih baik

Kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan. Peluang yang lebih baik sangat penting untuk mengangkat rumah tangga keluar dari kemiskinan dan kerawanan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, langkah-langkah perlindungan sosial perlu melengkapi penciptaan lapangan kerja untuk membantu rumah tangga miskin dan melindungi masyarakat lainnya agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan lebih komprehensif. Diperlukan adanya sistem bantuan sosial yang lebih responsif dan perluasan cakupan jaminan sosial, termasuk bagi para pekerja informal, untuk meningkatkan ketangguhan rumah tangga agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Inklusi keuangan yang lebih baik dapat membantu rumah tangga mengatasi guncangan pendapatan tanpa menggunakan strategi penanggulangan yang merugikan. Investasi dalam infrastruktur yang tangguh dan produksi pertanian yang cerdas iklim juga penting untuk membatasi dampak guncangan.

Peningkatan bantuan sosial mencakup peningkatan kualitas penetapan target dan pemberian manfaat yang lebih memadai. COVID-19 memberikan pelajaran mengenai cara meningkatkan sistem bantuan sosial Indonesia. Yang pertama, cakupan basis data penetapan target dapat diperluas melampaui 40 persen masyarakat terbawah untuk mencakup semua rumah tangga, untuk mendukung perluasan penetapan target yang

cepat dan fleksibel jika terjadi guncangan. Kedua, akurasi penetapan target dapat ditingkatkan – misalnya, melalui pemutakhiran basis data penetapan target secara rutin dan penyesuaian kriteria kelayakan untuk mencerminkan definisi kemiskinan yang baru. Ketiga, kecukupan manfaat dapat ditingkatkan. Sistem bantuan sosial yang lebih baik seperti itu akan mengurangi dampak kejutan negatif pada rumah tangga dengan lebih baik, dan dengan demikian akan mengurangi penggunaan strategi penanggulangan yang merusak dan lebih mampu melakukan investasi jangka panjang dalam kegiatan produktivitas yang lebih tinggi.

Memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh pekerja dapat meningkatkan perlindungan dan produktivitas. Selain bantuan sosial, jaminan sosial dapat membantu mengurangi dampak guncangan yang merugikan. Guncangan pengangguran dan kesehatan merupakan guncangan tingkat rumah tangga yang paling penting, dan jaminan pengangguran serta jaminan kesehatan dapat memberikan perlindungan. Namun demikian, di Indonesia jaminan pengangguran saat ini hanya tersedia bagi pekerja bergaji, biasanya pekerja formal. Selain itu, guncangan kesehatan sering berimplikasi pada pendapatan tenaga kerja, karena produktivitas yang lebih rendah atau tidak tersedianya pekerjaan karena sakit atau membutuhkan perawatan kesehatan. Saat ini, hanya pekerja formal yang memiliki perlindungan untuk kejadian-kejadian tersebut. Dengan demikian, rumah tangga yang lebih miskin, yang memiliki pekerjaan yang kurang terjamin, adalah yang paling sedikit mendapat manfaat dari perlindungan, tidak hanya membuat mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan, tetapi juga membatasi kemajuan ketidakesetaraan.

Mengikutsertakan masyarakat miskin dalam sistem keuangan digital dapat memainkan peran penting dalam menciptakan ketangguhan terhadap guncangan dan mengurangi kemiskinan. Banyak rumah tangga Indonesia tetap tidak memiliki rekening bank; meskipun inklusi keuangan telah meningkat, setengah dari semua orang dewasa di masyarakat di desil 40 terbawah masih belum memiliki rekening bank pada tahun 2021. Dengan tidak memiliki rekening mengurangi

kemampuan menabung, yang dapat memperlancar konsumsi saat terjadi guncangan dan mengganti aset yang hilang. Hal ini juga menyebabkan rumah tangga tidak dapat menerima pembayaran digital – misalnya, dari pemerintah yang memberikan bantuan sosial dengan cepat dan efisien sebagai tanggapan terhadap guncangan. Melibatkan lebih banyak rumah tangga dalam layanan keuangan digital dapat menumbuhkan ketangguhan terhadap guncangan sebagai pelengkap bantuan dan jaminan sosial. Membangun sistem pembayaran yang berfungsi dengan baik dan sepenuhnya dapat dioperasikan bersama dengan ID digital dan kebijakan perbankan yang terbuka dapat memperluas layanan keuangan dan menjadikannya lebih menarik bagi rumah tangga, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ketangguhan.

Berinvestasi dalam infrastruktur yang tangguh dan investasi cerdas iklim dapat mengurangi dampak merugikan dari bencana alam. Guncangan akibat bencana membahayakan kemajuan pengentasan kemiskinan. Meskipun rumah tangga miskin belum tentu lebih rentan terhadap bencana alam, mereka kurang tangguh sehingga paling menderita akibat guncangan. Misalnya, di daerah yang terkena dampak gempa bumi pada bulan September 2018 di Sulawesi Tengah, satu dari lima rumah tangga dari masyarakat di desil 40 terbawah masih menempati rumah sementara tujuh bulan kemudian, dibandingkan dengan 13 persen dari masyarakat di desil 20 persen teratas. Perubahan iklim juga akan mengurangi hasil pertanian yang diharapkan karena perubahan curah hujan, suhu, dan peristiwa cuaca ekstrem. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur yang tangguh dan produksi pertanian yang cerdas iklim penting untuk membatasi kehancuran akibat guncangan sejak awal.

Pembiayaan investasi yang berpihak pada masyarakat miskin

Meningkatkan penerimaan pajak dan menghilangkan subsidi yang tidak efisien dapat menciptakan ruang fiskal untuk melakukan investasi yang berpihak pada masyarakat miskin, sementara peningkatan kapasitas administrasi daerah dapat meningkatkan layanan publik. Investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial akan membutuhkan lebih banyak sumber daya keuangan daripada yang tersedia saat ini. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui pengurangan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) serta cukai atas tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis, yang akan menciptakan dampak kesehatan yang menguntungkan. Pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan mendorong peralihan ke ekonomi rendah karbon, sekaligus mengurangi pencemaran udara. Menghapus subsidi yang terdistorsi – khususnya untuk energi dan pertanian – juga dapat menciptakan sumber daya fiskal tambahan. Sistem bantuan sosial yang berfungsi dengan baik dapat memitigasi dampak negatif bagi masyarakat miskin dari langkah-langkah tersebut, dengan sebagian kecil dari biaya kebijakan saat ini. Sumber daya fiskal tambahan dari langkah-langkah tersebut dapat diarahkan untuk membiayai investasi yang berpihak pada masyarakat miskin untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, peningkatan kapasitas administratif pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas belanja, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi kesenjangan geografis.

Menghapus pembebasan PPN dan menaikkan pajak atas alkohol, tembakau, gula, dan karbon dapat menghasilkan tambahan penerimaan pemerintah. Cara praktis untuk meningkatkan penerimaan PPN dengan cepat adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Sementara barang-barang tersebut seringkali merupakan pangsa yang lebih besar dari konsumsi rumah tangga yang lebih miskin, barang-barang tersebut juga dikonsumsi oleh rumah tangga yang lebih kaya dan biasanya dalam jumlah yang lebih banyak. Sepertiga dari potensi penerimaan PPN (0,7 persen dari PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini, cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada tahun 2019. Tembakau, alkohol, dan minuman berpemanis memiliki dampak

kesehatan yang negatif, dengan implikasi biaya yang besar bagi kesehatan masyarakat. Menaikkan pajak atas barang-barang tersebut akan mengurangi konsumsinya, menghemat biaya untuk sistem kesehatan publik sekaligus menghasilkan penerimaan pemerintah. Yang terakhir, pajak karbon dapat meningkatkan penerimaan dan membuat investasi di sektor karbon tinggi menjadi kurang menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Indonesia – misalnya, terkait dengan ekspor ke negara-negara yang mengenakan tarif impor untuk produk-produk berkarbon tinggi, seperti mekanisme penyesuaian batas karbon UE. Reformasi ini dapat merugikan rumah tangga miskin, berpotensi mengurangi pendapatan mereka, tetapi program bantuan sosial dapat memberi kompensasi kepada rumah tangga. Ini hanya akan menelan biaya sebagian kecil dari penerimaan yang diperoleh tetapi memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam mengurangi ketimpangan.

Menghapus subsidi energi dan pertanian dapat meningkatkan sumber daya fiskal lebih lanjut. Subsidi energi mahal dan tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sementara reformasi yang ambisius pada tahun 2015 mulai mengurangi subsidi energi, bantuan sosial tidak ditingkatkan dengan cukup cepat dengan kompensasi yang memadai. Hal ini mungkin telah berkontribusi pada ekonomi politik yang kembali ke subsidi, yang kembali dari biaya 0,7 persen dari PDB pada tahun 2016 menjadi 1,7 persen dari PDB pada tahun 2019. Namun demikian, subsidi tersebut hanya mengurangi kemiskinan sebesar 2,4 poin persentase, sebanyak seperangkat program bantuan sosial inti yang biayanya hanya 0,4 persen dari PDB. Bantuan sosial tidak hanya lebih efisien untuk mengurangi kemiskinan tetapi juga sangat progresif dalam menurunkan ketimpangan. Di sisi lain, sebagian besar subsidi BBM tidak tepat sasaran dan bahkan dapat bersifat regresif, tetapi berkontribusi terhadap emisi GRK yang lebih tinggi. Pemerintah juga membelanjakan 2 hingga 3 persen dari PDB untuk pertanian, sebagian besar untuk subsidi produk pertanian. Namun demikian, subsidi tersebut tidak tepat sasaran bagi petani miskin, sebagian besar tidak efektif, mendistorsi pasar pertanian, dan

melemahkan produktivitas pertanian. Meninjau kembali belanja pertanian untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas dapat menghasilkan penghematan fiskal yang besar.

Meningkatkan kapasitas administrasi daerah dapat meningkatkan kualitas belanja, pemberian layanan, dan sumber daya manusia, sekaligus mengurangi kesenjangan geografis. Indonesia mulai melakukan desentralisasi sekitar dua dekade lalu. Pemerintah daerah (Pemda) bertanggung jawab atas sekitar 40 persen dari total belanja pemerintah untuk penyediaan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, kualitas belanja daerah terbatas, baik dalam efisiensi alokatif maupun teknis. Efisiensi alokatif mengalami ketidakejajaran sumber daya Pemda, daerah yang kurang terlayani dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, sehingga memperparah kesenjangan geografis dan memperburuk ketimpangan. Efisiensi teknis diperlemah oleh peningkatan anggaran Pemda tanpa adanya peningkatan hasil penyampaian layanan. Meningkatkan kapasitas administratif, dengan fokus pada Pemda yang berkapasitas paling rendah, dapat meningkatkan hasil keseluruhan dan menjadikannya lebih adil, sambil membantu mengatasi kesenjangan geografis yang mencolok dalam kemiskinan non-moneter.

Memperbaiki kebijakan di masa depan

Memperkuat statistik resmi untuk memungkinkan penggunaan data dan menutup kesenjangan analitis dapat membantu memberi informasi bagi pengambilan kebijakan dan meningkatkan desain kebijakan. Menutup beberapa celah penting dapat meningkatkan statistik resmi. Misalnya, Indonesia perlu menciptakan garis kemiskinan absolut dan menciptakan indeks harga konsumen (IHK) pedesaan yang sesuai. Penggunaan pengumpulan data Indonesia yang mengesankan dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses data yang lebih terbuka. Tantangan baru – seperti peran transformasi struktural dan informalitas, serta implikasinya terhadap kemiskinan – akan membutuhkan kebijakan baru berdasarkan data dan bukti yang baru dan lebih baik.



THE WORLD BANK

IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

East Asia & Pacific